

**PAPER HUBUNGAN INDUSTRIAL**

**Peran Tenaga Kerja dalam Konsep Kapitalis, Sosialis dan  
Pancasila**



Oleh :

Agnes Yosephine Saragih

(125030207111004)

Kelas A

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2014**

## 1) Menurut Pandangan Kapitalis

Ciri-ciri Ekonomi Kapitalisme :

- Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi dimana Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu dan Individu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya.
- Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar dimana Pasar berfungsi memberikan “signal” kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “The Invisible Hand” yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba.
- Manusia dipandang sebagai makhluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme).

Dalam sistem kapitalisme, otak, otot dan syaraf dari buruh membentuk persediaan tenaga kerja. Persediaan atau stok tenaga kerja ini bagi Marx adalah sebuah substansi yang tidak ada bedanya dengan persediaan benda lainnya. Kita dapat menggambarkannya sebagai seorang budak. Bagi Marx tidak ada perbedaan antara kontrak kerja dengan buruh dan membeli budak. Jelas bahwa kontrak kerja dengan buruh berarti membeli tenaga kerjanya saja, tidak membeli seluruh manusia buruh. Oleh karena buruh tidak ada bedanya dengan benda lainnya, seiring dengan teori Marx tentang nilai, maka dalam pasar dengan persaingan sempurna dan dalam kondisi keseimbangan, buruh harus dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memproduksi buruh. Segera timbul pertanyaan, jumlah jam kerja berapakah yang dibutuhkan untuk memproduksi persediaan tenaga kerja yang terdapat di dalam tubuh manusia seorang buruh ? Jawabnya adalah jumlah jam tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengasuh, memberi makan, memberi pakaian dan perumahan kepada buruh. Maka kalau buruh menjual sebagian dari tenaga kerjanya, upahnya harus sama dengan bagian-bagian dari mengasuh, memberi sandang, pangan dan papan kepada manusia buruh, persis seperti pedagang budak yang menjual budak akan menerima harga yang sebanding dengan jumlah jam kerja. Maka bagi Marx seorang buruh memperoleh nilai yang sepenuhnya.

Namun bilamana seorang kapitalis telah membeli persediaan tenaga kerja, mereka bisa mempekerjakan buruh lebih lama dibandingkan dengan jumlah jam yang dibutuhkan untuk memproduksi persediaan tenaga kerja buruh yang bersangkutan. Dengan demikian sang kapitalis memeras jam kerja yang lebih lama dibandingkan dengan upah yang dibayarkan. Karena produk yang diperoleh dari jam-jam kerja buruh ekstra itu dapat dijual dengan harga yang sebanding dengan jumlah jam kerja yang *de facto* diperoleh majikan kapitalis, terdapat selisih nilai antara yang diperoleh dan dibayarkan, dan selisih positif ini jatuh ke tangan kapitalis. Sang kapitalis meng-eksploitasi buruh, dan merebut nilai lebihnya, walaupun sang buruh memperoleh bayaran yang sesuai dengan

tenaga kerjanya dan konsumen tidak membayar lebih dari nilai barang jadi yang dibelinya. Marx terobsesi ingin “ilmiah” untuk menuju pada rangkaian teorinya tentang nilai, tentang eksploitasi tanpa mau terjerumus pada romantisme membela yang lemah. Teori nilai tenaga manusia tidak dapat dipakai untuk faktor produksi manusia, karena secara implisit berarti bahwa faktor produksi tenaga manusia diproduksi dengan cara yang sama dengan faktor produksi lainnya, misalnya mesin, yang diproduksi atas dasar kalkulasi harga pokok yang rasional. Karena produksi manusia sama sekali tidak ada miripnya dengan memproduksi mesin, maka teorinya sudah gugur atas dasar titik tolak pikirannya dan atas dasar asumsi-asumsinya sendiri.

## 2) Menurut Pandangan Sosialis

Sosialisme atau sosialis adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut. "Kepemilikan sosial" bisa merujuk ke koperasi, kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan warga ekuitas, atau kombinasi dari semuanya. Ada banyak jenis sosialisme dan tidak ada definisi tunggal secara enskapitulasi dari mereka semua. Mereka berbeda dalam jenis kepemilikan sosial yang mereka ajukan, sejauh mana mereka bergantung pada pasar atau perencanaan, bagaimana manajemen harus diselenggarakan dalam lembaga-lembaga yang produktif, dan peran negara dalam membangun sosialisme. Gerakan politik sosialis mencakup beragam filsafat politik. Dikotomi inti dalam gerakan sosialis termasuk perbedaan antara reformisme dan sosialisme revolusioner dan antara sosialisme negara dan sosialisme libertarian. Sosialisme negara menyerukan nasionalisasi alat-alat produksi sebagai strategi untuk menerapkan sosialisme, sementara sosialis libertarian umumnya menempatkan harapan mereka pada cara desentralisasi demokrasi langsung seperti libertarian municipalisme, 'majelis, serikat buruh, dan dewan pekerja datang dari sikap anti-otoriter umum. Sosialisme demokratis menyoroti peran sentral proses demokrasi dan sistem politik dan biasanya kontras dengan gerakan politik non-demokratis yang mendukung sosialisme. Beberapa sosialis telah mengadopsi penyebab gerakan sosial lainnya, seperti lingkungan, feminisme dan liberalisme.

Karl Marx dan Friedrich Engels berpendapat bahwa sosialisme akan muncul dari keharusan sejarah kapitalisme yang diberikan sendiri sudah usang dan tidak berkelanjutan akibat dari meningkatnya kontradiksi internal yang muncul dari perkembangan kekuatan produktif dan teknologi. Itu menjadi kemajuan dalam kekuatan produktif yang dikombinasikan dengan hubungan sosial lama dengan produksi kapitalisme yang akan menghasilkan kontradiksi, dan kemudian mengarah ke kesadaran kelas pekerja.

Marx dan Engels berpandangan bahwa kesadaran orang-orang yang memperoleh upah atau gaji (kelas pekerja dalam arti Marxis luas) akan dibentuk oleh kondisi mereka yang menjadi budakan upah, yang mengarah ke kecenderungan untuk mencari kebebasan atau emansipasi mereka dengan

menggulingkan kepemilikan alat-alat produksi oleh kapitalis, dan akibatnya, menggulingkan negara yang menjunjung tinggi tata ekonomi kapitalis ini. Bagi Marx dan Engels, kondisi ini menentukan kesadaran dan mengakhiri peran kelas kapitalis yang pada akhirnya mengarah ke masyarakat tanpa kelas di mana negara akan melenyap.

Konsepsi sosialisme Marxis adalah bahwa fase sejarah tertentu yang akan menggantikan kapitalisme dan didahului dengan komunisme. Karakteristik utama dari sosialisme (terutama yang dipahami oleh Marx dan Engels setelah Komune Paris 1871) adalah bahwa kaum proletar akan mengontrol alat-alat produksi melalui negara buruh yang didirikan oleh para pekerja di kepentingan mereka. Kegiatan ekonomi masih akan diatur melalui penggunaan sistem insentif dan kelas sosial masih akan ada, tetapi untuk tingkat yang lebih rendah dan berkurang di bawah kapitalisme.

Marx berpendapat bahwa kekuatan produktif material (dalam industri dan perdagangan) dibawa ke dalam kehidupan oleh kapitalisme yang didasarkan pada masyarakat koperasi karena produksi telah mencakup massa sosial, sedangkan kegiatan kolektif kelas pekerja bertujuan untuk membuat komoditas, tetapi dengan kepemilikan pribadi (hubungan produksi atau hubungan barang). Konflik antara upaya kolektif di kalangan pabrik-pabrik besar dan kepemilikan pribadi akan membawa keinginan kesadaran dalam kelas pekerja untuk membangun kepemilikan kolektif sepadan dengan upaya kolektif pengalaman sehari-hari mereka.

Adapun kebaikan-kebaikan dari Sistem Ekonomi Sosialis adalah :

1. Disediakkannya kebutuhan pokok Setiap warga Negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan Negara.
2. Didasarkan perencanaan Negara Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Negara Yang sempurna, di antara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam System Ekonomi Kapitalis tidak akan terjadi.
3. Produksi dikelola oleh Negara Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh Negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan Negara.

### 3) Menurut Pancasila

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) departemen Tenaga kerja (*Anonim, 1987:9*) pengertian HIP ialah suatu sistem yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas keberibadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Untuk itu sebagai wujud pelaksanaan hubungan kerja antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah harus sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, artinya segala bentuk perilaku semua subjek yang terkait dalam proses harus mendasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila secara utuh.

Dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengertian istilah hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para perilaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Landasan hubungan industrial terdiri atas;

1. Landasan idil ialah pancasila
2. Landasan konsitusional ialah undang-undang dasar 1945
3. Landasan opsainal GBHN yang ditetapkan oleh MPR serta kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah

Berdasarkan hasil seminar HIP tahun 1974 (*Shamad, 1995: 12*) tujuan hubungan industrial adalah mengemban cita-cita proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk:

1. mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta
2. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui
3. penciptaan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha,
4. meningkatkan produksi dan
5. meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai derajat manusia.

Sedemikian berat dan mulianya tujuan tersebut, maka semua pihak yang terkait dalam hubungan industrial harus meahami untuk terwujudnya pelaksanaan hubungan industrial dengan baik.

Ciri-ciri Hubungan Industrial

1. Mengakui dan menyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya.
3. Melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan yang bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan.
4. Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan.
5. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak, atas dasar rasa keadilan dan kepatutan.

#### Sarana Hubungan Hubungan Industrial

1. Serikat pekrja/serikat buruh
2. Organisasi pengusaha
3. Lembaga kerja sama bipartit
4. Lembaga kerja sama Tripartit
5. Peraturan Perusahaan
6. Perjanian kerja bersama
7. Peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dan
8. Lebaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial